

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH
DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI
SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
(STUDI KASUS DESA PADANG TANGGUL)**

PROPOSAL SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk menyusun skripsi Pada Program Studi
Administrasi Publik



OLEH:

RAMONA

NPM: 2022322

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINISTRASI AMUNTAI
PROGRAM STUDI ADMINISTRASI PUBLIK**

2026

TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : Ramona

NPM : 2022322

Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah
Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten
Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan sepenuhnya kami dapat menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbing skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M.AP
NUPTK. 9149753655300033

Pembimbing 2



Selamat Rindi, S.Sos., M. AP
NUPTK. 8641771672130312



Ketua Program Studi Administrasi Publik

Ahmad Baihaqi, S.Sos., M.A
NIK. 19921104 2015091 021

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya ucapkan kepada Allah SWT yang Maha Pengasih lagi Maha Penyanyang, Tuhan semesta alam. Tidak lupa sholawat dan salam semoga terlimpahkan kepada Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya. Syukur Alhamdulillah, atas rahmat dan hidayah yang diberikan Allah SWT sehingga penulis bisa menyelesaikannya proposal skripsi yang berjudul **“IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN SAMPAH DI DAERAH TEPIAN SUNGAI KECAMATAN AMUNTAI SELATAN KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (STUDI KASUS DESA PADANG TANGGUL)”**. Sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi untuk memperoleh gelar sarjana (S1) pada Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai.

Terwujudnya proposal skripsi ini tentu tidak terlepas dari dukungan berbagai pihak yang telah memberikan motivasi dan masukan kepada penulis. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ucapan Syukur kepada Allah SWT karena telah memberikan kesehatan dan kelancaran kepada penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi ini.
2. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M. AP., CIQaR, CIQnR selaku ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
3. Bapak Ahmad Baihaqi S.Sos., M.A. Ketua Prodi Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Publik.
4. Ibu Sri Agusmila Aneta Herlinda, S.Pd., M. AP selaku Dosen Pembimbing I yang telah banyak membantu, memberikan banyak pengarahan, bimbingan

dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

5. Bapak Selamat Riadi, S.Sos., M. AP selaku Dosen Pembimbing II yang telah banyak membantu, memberikan banyak pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada penulis sehingga proposal skripsi ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya.

Penulis berharap proposal skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi para pembaca. Kritik, saran dan masukan yang bersifat membangun akan penulis terima demi kesempurnaan proposal skripsi ini.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang.....	1
B. Fokus Penelitian.....	4
C. Rumusan Masalah.....	4
D. Tujuan Penelitian	5
E. Manfaat Penelitian	5

BAB II LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu.....	6
B. Tinjauan Teoritis.....	9
C. Kerangka Berpikir.....	18

BAB III METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian.....	21
B. Pendekatan Penelitian	21
C. Tipe Penelitian	21
D. Data dan Sumber Data	22
E. Desain Operasional Penelitian	24
F. Teknik Pengumpulan Data.....	25
G. Teknis Analisis Data	27
H. Uji Kredibilitas Data	28

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 3.1 Informan Penelitian.....	23
Tabel 3.2 Desain Operasional Penelitian	25

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pemikiran.....	20
------------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Permasalahan sampah menjadi isu penting yang terjadi seiring dengan perkembangan dan aktivitas pembangunan yang terus meningkat. Sampah telah menjadi permasalahan nasional yang mengharuskan pengelolaannya dilakukan dengan pendekatan yang terpadu dan menyeluruh. Pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah telah menggunakan kewenangannya untuk memberikan landasan hukum dan kejelasan tanggung jawab guna mengurangi permasalahan sampah di Indonesia.

Masalah sampah merupakan isu global yang semakin kompleks dan mendesak untuk diatasi. Di Indonesia, jumlah sampah terus meningkat setiap tahunnya, terutama di daerah perdesaan. Permasalahan lingkungan hidup yang seringkali menjadi sorotan masyarakat saat ini adalah mengenai sampah, permasalahan sampah yang terlihat saat ini yaitu sampah masih menjadi sumber polusi udara karena baunya dan polusi air yang dikenakan penanganan air yang kurang tepat serta menjadi penyebab terjadinya wabah penyakit dan juga banjir.

Pengelolaan sampah merupakan salah satu tantangan utama yang dihadapi oleh masyarakat di berbagai daerah. Banyak sungai yang mengalami pencemaran akibat sampah domestik, termasuk plastik dan limbah rumah tangga, yang berasal dari masyarakat yang tinggal di sepanjang bantaran sungai. Praktik pembuangan sampah langsung ke sungai sering terjadi akibat

tidak tersedianya fasilitas pengelolaan sampah yang memadai dan rendahnya kesadaran lingkungan masyarakat.

Berbicara mengenai masalah sampah, banyak masyarakat yang tidak mematuhi adanya aturan, khususnya daerah pinggiran sungai, masih banyak sampah yang menumpuk di jalan dan di genangan sungai dikarenakan kurangnya sarana prasarana dan kesadaran masyarakat. Dalam praktiknya, implementasi kebijakan pengelolaan sampah tidak selalu berjalan efektif. Penelitian pada berbagai daerah menunjukkan kendala dalam pelaksanaan kebijakan seperti keterbatasan sumber daya manusia, anggaran yang minim, koordinasi antar-aktor yang lemah, serta komunikasi kebijakan yang belum optimal. Peraturan daerah yang seharusnya dilaksanakan oleh setiap orang, organisasi, maupun lembaga/instansi namun kenyataannya masih banyak yang melanggar aturan tersebut. Selain pemerintah, partisipasi masyarakat dalam hal pengelolaan sampah masih belum maksimal.

Pemerintah seharusnya menyelenggarakan sosialisasi kepada masyarakat supaya membuang sampah ke sungai tidak menjadi kebiasaan. Pembuangan sampah di sungai juga memberikan dampak negatif bagi masyarakat yang menggunakan air, selain itu apabila air sungai meluap maka akan banyak sampah-sampah yang sangkut ditepian sungai. Sampah yang menumpuk semakin hari semakin menumpuk menimbulkan bau yang tidak sedap bagi rumah-rumah masyarakat yang berada di aliran sungai. Masih banyak masyarakat Desa Padang Tanggul yang tidak menyadari akan pentingnya menjaga kebersihan dan tidak membuang sampah ke sungai.

Kebiasaan masyarakat membuang sampah ke sungai juga dikarenakan sarana dan prasarana yang kurang memadai seperti tidak banyaknya tong sampah, tidak disediakan tempat pembuangan sampah di area daerah pinggiran sungai, dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah.

Dari data di atas dapat disimpulkan bahwa peneliti menemukan fenomena-fenomena berdasarkan observasi yang dilakukan peneliti di lapangan, diantaranya:

1. Belum optimalnya kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tepian sungai Desa Padang Tanggul, terlihat dari rendahnya partisipasi masyarakat dalam mendukung pelaksanaan kebijakan sampah, yang mana masih ditemukannya praktik pembuangan sampah di sungai dan di tepian sungai oleh masyarakat.
2. Keterbatasan sarana dan prasarana seperti kurangnya fasilitas tempat sampah dan tidak tersedianya layanan angkutan sampah, sehingga masyarakat kebiasaan menumpuk sampah di tepian sungai dan membuang sampah ke sungai.
3. Kurangnya sosialisasi ke masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai dan di tepian sungai.

Dari permasalahan diatas maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam dan mengangkat judul penelitian tentang “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)”.

B. Fokus Penelitian

Fokus penelitian dimaksudkan untuk mempertegas fakta atau fenomena serta ruang lingkup masalah yang akan dibahas agar tidak menimbulkan terlalu luasnya penafsiran mengenai permasalahan dan pembahasan terhadap permasalahan menjadi terarah dan tidak menyimpang dari pokok permasalahan yang peneliti bahas.

Maka peneliti memfokuskan penelitian dalam model Implementasi Kebijakan Jan Merse (Reno Affrian, 2023: 47-48) yaitu:

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi

C. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?
2. Faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul)?

D. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bagaimana Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mempengaruhi Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).

E. Manfaat Penelitian

1. Secara teoritis, hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu pengetahuan, dalam hal ini disiplin Ilmu Administrasi Publik khususnya yang berkaitan dengan kebijakan publik.
2. Secara praktis, dapat memberikan bahan perbandingan dan informasi awal bagi peneliti lain yang hendak mengkaji secara mendalam tentang Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul). Dan sebagai bahan masukan bagi Desa Padang Tanggul dalam implementasi kebijakan pengelolaan sampah di daerah tepian sungai.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu adalah upaya peneliti untuk mencari perbandingan dan selanjutnya untuk menemukan inspirasi baru untuk penelitian selanjutnya disamping itu kajian terdahulu membantu penelitian dapat memposisikan penelitian serta menunjukkan orisinalitas dari penelitian.

Sebagai bahan pertimbangan dalam sebuah penelitian selanjutnya maka penulis memuat 2 hasil penelitian terdahulu yaitu:

1. Atika Ariani (2023), Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA)

Amuntai. Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)”**. Fenomena masalah dari penelitian tersebut yaitu terdapat pada Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung yang tidak memiliki sarana dan prasarana pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga, kurangnya sosialisasi dari pemerintah desa dan kabupaten kepada masyarakat, dan kurang kesadaran masyarakat dalam kebersihan lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan Teori Implementasi Donald Van Metter & Carl Van Horn dan metode penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor

38 tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung) belum baik terdapat 6 subvariabel dan 14 indikator, terdapat 10 indikator belum baik dan 4 indikator cukup baik. Indikator yang cukup baik yaitu tujuan, koordinasi, kondisi ekonomi dan kondisi sosial. Sedangkan indikator yang belum baik yaitu ukuran keberhasilan, sumber daya manusia, sumber daya anggaran, sumber daya waktu pelaksanaan, organisasi formal, organisasi informal, respon implementor, kognisi permasalahan, kerjasama, dan kondisi politik. Adapun faktor pendorong yaitu tujuan dan koordinasi, faktor penghambat yaitu tidak adanya fasilitas pengelolaan sampah, kurangnya sosialisasi dan kurangnya kesadaran masyarakat.

2. **Mira Jayanti (2022), Universitas Pasundan.** Dalam penelitian yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah Di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung”**. Fenomena masalah dari penelitian tersebut adalah tingginya volume penumpukan sampah yang ada di kabupaten Bandung. Hal ini terjadi karena dengan bertambahnya jumlah penduduk yang diakibatkan dari kegiatan masyarakat. Desa Banjaran memiliki masalah sampah yang sudah menahun, banyak tumpukan sampah yang tersebar di beberapa titik di desa Banjaran. Titik-titik tumpukan sampah yang ada di Desa Banjaran ialah seperti di lahan kosong, di perkampungan wilayah desa Banjaran dan di pinggir jalan Banjaran-Soreang. Selain itu juga penumpukan yang terjadi di Desa Banjaran dikarenakan oleh keterbatasan lahan untuk mengelola

sampah di desa banjaran dan kurangnya kesadaran masyarakat untuk membuang sampah pada tempatnya, sehingga sampah banyak menumpuk di pinggir jalan dan di lahan kosong dan masih banyak masyarakat yang membakar sampahnya menyebabkan polusi udara, hal tersebut membahayakan Kesehatan. Teori yang dipakai penelitian ini adalah teori Implementasi Kebijakan model Edward III yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi, dan Struktur Organisasi dengan menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten bandung (studi kasus: Desa Banjaran) bahwa komunikasi yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung bersama pelaksana kebijakan pengelolaan sampah Desa Banjaran sudah dilaksanakan, namun belum maksimal. Sumberdaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung belum memadai sehingga menghambat dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah. Disposisi dan struktur birokrasi sudah dilakukan cukup baik oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung. Namun, dalam pelaksanaannya belum terlaksana dengan optimal. Maka dari itu, diharapkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Bandung memberikan sosialisasi dan mengedukasi masyarakat secara konsisten agar pengelolaan sampah dilakukan secara keseluruhan, mandiri dan menjadikan sampah sebagai sumberdaya.

B. Tinjauan Teoritis

1. Kebijakan Publik

a. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan konsep sentral dalam studi administrasi publik dan kebijakan publik karena menjadi instrumen utama pemerintah dalam menyelesaikan permasalahan masyarakat. Menurut David Easton (Rahayu, 2016:17) memberikan definisi tentang kebijakan publik yaitu alokasi nilai-nilai secara sah untuk seluruh anggota masyarakat. Eulau dan Prewitt (Agustino, 2022:15-16) mendefinisikan kebijakan sebagai keputusan tetap yang dicirikan oleh konsistensi dan pengulangan tingkah laku dari mereka yang membuat dan dari mereka yang mematuhi keputusan tersebut.

Sementara itu Thomas R. Dye (Rahayu, 2016:17) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah apa pun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan (*public policy is whatever the governments choose to do or not to do*). Pandangan ini menegaskan bahwa keputusan pemerintah untuk tidak bertindak terhadap suatu masalah publik juga merupakan bagian dari kebijakan publik, karena memiliki implikasi langsung terhadap masyarakat. Sementara itu, Anderson (Agustino, 2022:16) mendefinisikan kebijakan publik sebagai serangkaian kegiatan yang memiliki tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang atau sekelompok aktor yang berhubungan dengan permasalahan atau sesuatu hal yang diperhatikan.

Berdasarkan pendapat berbagai ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik adalah serangkaian keputusan dan tindakan yang dipilih serta dilaksanakan oleh pemerintah yang bersifat mengikat, memiliki tujuan tertentu, dan ditujukan untuk mengatasi permasalahan publik serta memengaruhi kehidupan masyarakat secara luas. Kebijakan publik tidak berdiri sebagai keputusan tunggal, melainkan sebagai proses yang melibatkan aktor-aktor pemerintah, tujuan yang jelas, serta konsekuensi nyata bagi masyarakat. Kebijakan untuk melakukan sesuatu biasanya tertuang dalam ketentuan-ketentuan atau perundang-undangan yang dibuat oleh pemerintah sehingga memiliki sifat yang mengikat dan memaksa.

b. Tujuan Kebijakan Publik

Kebijakan publik pada hakikatnya disusun untuk menyelesaikan masalah publik yang dihadapi masyarakat serta mengarahkan tindakan pemerintah agar tujuan tertentu dapat tercapai secara efektif dan efisien. Menurut Winarno (2014) Kebijakan publik bertujuan memberikan pedoman bagi aparatur pemerintah dalam bertindak sekaligus menjadi alat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat secara luas.

c. Tahap-Tahap Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang kompleks karena melibatkan banyak proses maupun variabel yang harus dikaji. Oleh karena itu beberapa ahli politik yang menaruh minat untuk mengkaji kebijakan publik membagi proses-proses penyusunan kebijakan publik kedalam beberapa tahap. Tujuan pembagian seperti ini

adalah untuk memudahkan kita dalam mengkaji kebijakan publik. Namun demikian, beberapa ahli mungkin membagi tahap-tahap ini dengan urutan yang berbeda. Tahap-tahap kebijakan publik menurut William Dunn sebagaimana dikutip Budi Winarno (2014: 35-37) adalah sebagai berikut:

- 1) Tahap penyusunan agenda. Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini mungkin suatu masalah tidak disentuh sama sekali, sementara masalah yang lain ditetapkan menjadi fokus pembahasan, atau ada pula masalah karena alasan-alasan tertentu ditunda untuk waktu yang lama.
- 2) Tahap formulasi kebijakan. Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif atau pilihan kebijakan (*policy alternatives/policy options*) yang ada. Dalam perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Dalam tahap ini masing-masing aktor akan bersaing dan berusaha untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- 3) Tahap adopsi kebijakan. Dari sekian banyak alternatif kebijakan yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau putusan pengadilan.
- 4) Tahap implementasi kebijakan. Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan elit jika program tersebut tidak diimplementasikan, yakni dilaksanakan oleh badan-badan administrasi maupun agen-agen pemerintah di tingkat bawah. Kebijakan yang telah diambil dilaksanakan oleh unit-unit administrasi yang memobilisasikan sumber daya finansial dan manusia. Pada tahap implementasi ini berbagai kepentingan akan saling bersaing. Beberapa implementasi kebijakan mendapat dukungan para pelaksana (*implementors*), namun beberapa yang lain mungkin akan ditentang oleh para pelaksana.

- 5) Tahap evaluasi kebijakan. Dalam tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi, untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat untuk meraih dampak yang diinginkan, yaitu memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Oleh karena itu ditentukan ukuran-ukuran atau kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan publik yang telah dilaksanakan sudah mencapai dampak atau tujuan yang diinginkan atau belum.

2. Implementasi Kebijakan

a. Pengertian Implementasi Kebijakan

Menurut Mazmanian dan Sabatier (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah pelaksanaan keputusan biasanya dalam bentuk undang-undang, tetapi dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting ataupun keputusan badan peradilan. Lazimnya, keputusan tersebut mengidentifikasikan masalah yang ingin diatasi, menyebutkan secara tegas tujuan atau sasaran yang ingin dicapai, dan berbagai cara untuk mengatur proses implementasinya. Sedangkan Menurut Van Meter dan Van Horn (Agustino, 2022:146) berpendapat bahwa implementasi merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu-individu, kelompok-kelompok, pejabat-pejabat, pemerintah ataupun swasta yang di arahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan.

Menurut Sahya Anggara (2014:232) implementasi kebijakan merupakan suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh pelaksana kebijakan dengan harapan akan memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran suatu kebijakan. Esensi utama dari implementasi kebijakan adalah memahami apa yang seharusnya terjadi sesudah suatu

program dinyatakan berlaku atau dirumuskan. Pemahaman tersebut mencakup usaha untuk mengadministrasikannya dan menimbulkan dampak nyata pada masyarakat.

Implementasi kebijakan merupakan tahapan yang sangat penting dalam keseluruhan struktur kebijakan karena melalui prosedur inilah suatu masalah publik dapat diselesaikan atau tidak. Hal ini dipertegas oleh Udoji (Agustino, 2022:147) Implementasi kebijakan adalah sesuatu yang penting bahkan mungkin jauh lebih penting daripada formasi kebijakan, kebijakan-kebijakan hanya akan sekedar berupa impian atau rencana bagus yang tersimpan rapi dalam arsip kalau tidak dilaksanakan.

b. Model Implementasi Kebijakan

1) Model Implementasi Kebijakan Van Metter dan Van Horn

Model pertama adalah model yang paling klasik yang diperkenalkan oleh Donald Van Meter dan Carl Van Horn (1975). Model ini menegaskan bahwa “Implementasi kebijakan berjalan secara linier dari kebijakan publik, implementor, dan kinerja kebijakan publik”. Beberapa variabel yang mempengaruhi proses kebijakan publik adalah:

- a) Aktivitas implementasi dan komunikasi antar organisasi,
- b) Karakteristik dan agen pelaksana/Implementor,
- c) Kondisi ekonomi, sosial, dan politik,
- d) Kecenderungan dari pelaksana/Implementor.

2) Model Implementasi Kebijakan George Edwards III

Edwards III (1980) mengemukakan: *In our approach to the study of policy implementation, we begin in the abstract and ask : What are the preconditions for successful policy implementation? What are the primary obstacles to successful policy implementation?* Untuk menjawab pertanyaan penting itu, maka Edwards III (1980) menawarkan dan mempertimbangkan empat faktor dalam mengimplementasikan kebijakan publik, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

3) Model Implementasi Kebijakan Jan Merse

Jan Merse mengemukakan bahwa model implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor-faktor sebagai berikut:

- a) Informasi
- b) Isi kebijakan
- c) Dukungan masyarakat
- d) Pembagian potensi.

Khusus dukungan masyarakat berkaitan erat dengan dukungan dan partisipasi masyarakat sebagai salah satu pemangku kepentingan (*stakeholder*) dalam proses pelaksanaan program. Penegasan Jan Merse menunjukkan bahwa setiap implementasi kebijakan tetap membutuhkan dukungan masyarakat atau partisipasi masyarakat sebagai pemangku kepentingan. Hal itu berkaitan dengan pentingnya partisipasi masyarakat di setiap implementasi kebijakan program pembangunan dan kemasyarakatan.

4) Model Implementasi Warwic

Warwic mengatakan bahwa dalam implementasi kebijakan terdapat faktor-faktor yang perlu diperhatikan, yaitu:

- a) Kemampuan organisasi
- b) Informasi
- c) Dukungan
- d) Pembagian potensi

c. Faktor Penentu Implementasi Kebijakan

Menurut Leo Agustino (2022:170-177) ada beberapa hal yang mengakibatkan suatu implementasi kebijakan dikatakan efektif atau tidak yaitu:

- 1) Respek anggota masyarakat pada otoritas dan keputusan pemerintah
- 2) Kesadaran untuk menerima kebijakan
- 3) Ada atau tidaknya sanksi hukum
- 4) Kepentingan pribadi atau kelompok
- 5) Bertentangan dengan sistem nilai yang ada
- 6) Keanggotaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi
- 7) Wujudnya kepatuhan selektif
- 8) Waktu
- 9) Sosialisasi
- 10) Koordinasi antar lembaga atau antar organisasi.

3. Sampah

a. Pengertian Sampah

Sampah adalah sisa-sisa bahan yang berasal dari aktivitas manusia maupun proses alam yang tidak lagi mempunyai nilai guna untuk pemiliknya dan dibuang ke lingkungan. Sampah dapat berupa bahan organik maupun anorganik yang dapat mengganggu fungsi lingkungan jika tidak dikelola dengan baik.

Secara umum, sampah adalah semua benda yang sudah tidak digunakan lagi oleh makhluk hidup, sehingga sifatnya menjadi buangan. Jadi benda sisa yang dihasilkan oleh manusia, hewan, bahkan tumbuhan semuanya berpotensi dianggap sebagai sampah selama tidak digunakan lagi. Sampah juga bisa didefinisikan sebagai material sisa dari rumah tangga dan produksi industri yang dibuang. Material sisa tersebut dapat berwujud zat padat, cair, hingga gas. Tidak jarang material seperti itu adalah bahan utama penyebab pencemaran lingkungan.

b. Pengelolaan Sampah

Pengelolaan sampah adalah pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, mendaur ulang dari material sampah. Kalimat ini biasanya mengacu pada material sampai yang dihasilkan dari kegiatan manusia, dan biasanya dikelola untuk mengurangi dampaknya terhadap kesehatan, lingkungan atau keindahan. Pengelolaan sampah bisa melibatkan zat padat, cair, gas, atau radioaktif dengan metode dan keterampilan khusus untuk masing-masing jenis zat.

Dalam pengelolaan sampah dilarang membuang sampah ke sungai-sungai, got ataupun saluran, jalan umum atau tempat umum lainnya. Pada masyarakat yang ada di desa khususnya Kecamatan Amuntai Selatan seperti Desa Padang Tanggul merupakan salah satu desa yang masyarakatnya masih membuang sampah ke sungai yang disebabkan belum optimalnya kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tepian sungai Desa Padang Tanggul terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat mengenai sampah, kurangnya sosialisasi kepada masyarakat untuk tidak menjadikan kebiasaan membuang sampah di sungai serta minimnya sarana dan prasarana seperti tidak tersedianya angkutan sampah sehingga menyebabkan menumpuknya sampah di tepian sungai yang mengakibatkan air sungai tercemar sehingga mengurangi kebersihan dan keindahan lingkungan.

c. Aturan Sampah

Sampah di Kabupaten Hulu Sungai Utara di atur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan Pasal 28-30 yaitu:

- 1) Waktu pembuangan sampah oleh masyarakat dilakukan mulai pukul 20.00 wita sampai dengan 07.00 wita.
- 2) Pembuangan sampah dilakukan dengan cara sampah wajib dibungkus dengan kantong plastik atau sejenisnya, sampah ditempatkan pada bak sampah yang tersedia atau pada halaman rumah masing-masing yang dilalui mobil atau gerobak pengangkut sampah.

- 3) Setiap orang pribadi atau badan dilarang meletakkan dan/atau membuang sampah di sembarang tempat, membuang sampah diluar waktu yang ditentukan, membuang sampah dengan cara yang tidak ditentukan, dan membuang atau menempatkan sampah khusus di tepi jalan umum, dan tidak dilakukan pengangkutan sampah dengan jam 09.00 wita.

C. Kerangka Berpikir

Pengelolaan sampah di daerah tepian sungai menjadi isu kritis karena sampah yang dibuang sembarangan dapat mencemari sungai dan lingkungan sekitar. Di Desa Padang Tanggul Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara, terdapat beberapa permasalahan utama yaitu, belum optimalnya kebijakan pengelolaan sampah di kawasan tepian sungai Desa Padang Tanggul, terlihat dari kurangnya partisipasi masyarakat, yang menyebabkan masyarakat masih membuang sampah di sungai. Keterbatasan sarana dan prasarana, yang mana tidak ada angkutan sampah, membuat masyarakat menumpuk sampah di tepian sungai atau membuang langsung ke sungai. Serta kurangnya sosialisasi dan edukasi, sehingga masyarakat belum sepenuhnya memahami pentingnya membuang sampah pada tempatnya.

Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan bertujuan untuk menjaga kebersihan sungai yaitu melindungi sungai dari pencemaran sampah, tetapi implementasinya sangat bergantung pada partisipasi masyarakat, ketersediaan sarana dan prasarana, serta sosialisasi kepada masyarakat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka peneliti mengambil teori Implementasi Kebijakan menurut Jan Marse (Reno Affrian, 2023:47-48) :

1. Informasi
2. Isi Kebijakan
3. Dukungan Masyarakat
4. Pembagian Potensi

Gambar 2.1

Kerangka Pemikiran



BAB III

METODE PENELITIAN

A. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang menjadi objek penelitian yang digunakan penulis adalah di daerah tepian sungai pada wilayah Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara di Desa Padang Tanggul.

Alasan memilih lokasi tersebut dikarenakan lokasi tersebut banyak timbunan sampah di tepian sungai yang belum terangkut. Dengan begitu dapat memudahkan penulis untuk terjun langsung kelapangan mengadakan observasi dan penggalian data.

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang dilakukan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dimana peneliti berupaya untuk mengamati, mengumpulkan dan menganalisa data serta mengungkapkan secara jelas Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul).

C. Tipe Penelitian

Dalam penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Dengan menggunakan jenis penelitian ini penulis ingin memberikan gambaran secara menyeluruh dan sistematis terkait dengan Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Daerah Tepian Sungai Kecamatan Amuntai Selatan Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Desa Padang Tanggul). Dengan kata lain penelitian kualitatif menghasilkan penelitian

deskriptif berupa kata-kata baik lisan maupun tulisan dari orang-orang dan perilaku yang akan dicermati.

D. Data dan Sumber Data

1. Data

Data dalam penelitian ini dibedakan menjadi dua jenis, yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari peninjauan langsung di lapangan pada objek penelitian, data tersebut diperoleh dari wawancara yang dilakukan peneliti terhadap pihak-pihak yang berkompeten dan akan di proses untuk tujuan penelitian.

Menurut Sugiyono (2023:296), data primer adalah data yang didapat langsung dari sumber aslinya. Data ini biasanya diberikan langsung oleh sumbernya kepada peneliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang didapat dari sumber bacaan dan berbagai sumber lain yang terdiri dari laporan, catatan, dokumen, dan studi pustaka yang diperoleh dari hasil penelitian sebelumnya. Menurut Sugiyono (2023:296) data sekunder yaitu sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen.

2. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana asal data penelitian itu diperoleh. Sumber data yang digunakan pada penelitian ini ialah *Purposive Sampling*. *Purposive Sampling* adalah teknik pengambilan sampel sumber

data dengan pertimbangan tertentu yakni sumber data dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan, sehingga mempermudah peneliti menjelajah obyek atau situasi sosial yang sedang diteliti, yang menjadi kepedulian dalam pengambilan sampel penelitian kualitatif adalah tuntasnya pemerolehan informasi dengan keragaman variasi yang ada, bukan pada banyak sampel sumber data. Adapun informan dalam penelitian ini dimuat dalam bentuk tabel sebagai berikut:

Tabel 3.1

Informan Penelitian

No	Jabatan	Keterangan
1	Kabid Pengelolaan Persampahan dan Peningkatan Kualitas Lingkungan Hidup Disperkim LH Hulu Sungai Utara	1 Orang
2	Kabid Penataan, Pengawasan dan Pengendalian Lingkungan Hidup Disperkim LH Hulu Sungai Utara	1 Orang
3	Kepala Desa Padang Tanggul	1 Orang
4	Ketua RT 1 Desa Padang Tanggul	1 Orang
5	Ketua RT 2 Desa Padang Tanggul	1 Orang
6	Ketua RT 3 Desa Padang Tanggul	1 Orang
7	Ketua RT 4 Desa Padang Tanggul	1 Orang
8	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
9	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
10	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
11	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang

12	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
13	Masyarakat Desa Padang Tanggul	1 Orang
Jumlah Informan		13 Orang

E. Desain Operasional Penelitian

Definisi operasional dalam variabel penelitian dimaksudkan untuk memahami arti setiap variabel penelitian sebelum dilakukannya analisis. Instrumen penelitian adalah semua alat yang digunakan untuk mengumpulkan, memeriksa, menyelidiki suatu masalah atau mengumpulkan, mengelola, menganalisis dan menyajikan data secara sistematis serta objektif dengan tujuan memecahkan suatu persoalan.

Desain Operasional Penelitian adalah alat bantu yang digunakan oleh peneliti untuk melakukan informasi tentang variabel yang sedang diteliti. Penelitian kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, dan menilai kualitas data. Variabel dalam penelitian ini mengambil teori yang dikemukakan oleh Jan Merse dalam (Reno Affrian, 2023:47-48). Penelitian ini terdiri dari 4 subvariabel yaitu informasi, isi kebijakan, dukungan masyarakat, dan pembagian potensi.

Adapun desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut:

Tabel 3.2
Desain Operasional Penelitian

Variabel	Sub Variabel	Indikator
Model Implementasi Kebijakan Jan Merse	Informasi	1. Penyaluran Informasi 2. Kejelasan Informasi
	Isi Kebijakan	1. Sasaran 2. Sarana dan Prasarana
	Dukungan Masyarakat	1. Partisipasi Masyarakat 2. Kepatuhan Masyarakat
	Pembagian Potensi	1. Pembagian wewenang dan tanggung jawab 2. Komitmen

F. Teknik Pengumpulan Data

Untuk pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi adalah suatu proses pengumpulan data yang dilakukan melalui pengamatan atau kegiatan mencari data terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran secara sistematis untuk suatu tujuan tertentu. Observasi (pengamatan) merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk

mengamati secara langsung sasaran (subyek) penelitian dan merekam peristiwa serta perilaku secara wajar, asli, tidak dibuat-buat, dan spontan dalam kurun waktu tertentu, sehingga diperoleh data yang cermat, mendalam, dan rinci. Metode digunakan oleh peneliti agar peneliti memperoleh pengalaman langsung dan dijadikan sebagai alat untuk melakukan uji kebenaran.

2. Wawancara

Wawancara merupakan bentuk komunikasi verbal atau percakapan langsung yang bertujuan untuk memperoleh informasi yang dibutuhkan peneliti. Wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan tanya jawab antara peneliti dengan obyek yang diteliti (informan). Dalam metode ini kreatifitas pewawancara sangat diperlukan karena dapat dikatakan bahwa hasil wawancara bergantung pada kemampuan peneliti untuk mencari jawaban, mencatat dan menafsirkan setiap jawaban. Menurut (Murdiyanto, 2020: 59) Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data dengan jalan komunikasi, yaitu melalui percakapan yang dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan gambaran dari sudut pandang subjek melalui suatu media tertulis dan dokumen lainnya yang ditulis atau dibuat langsung oleh subjek yang bersangkutan. Teknik pengumpulan data dengan dokumentasi ialah pengambilan data

yang diperoleh melalui dokumen-dokumen. Keuntungan menggunakan dokumentasi ialah biayanya relative murah, waktu dan tenaga lebih efisien. Sedangkan kelemahannya ialah data yang diambil dari dokumen cenderung sudah lama, dan kalau ada yang salah cetak maka peneliti ikut salah pula mengambil datanya. (Hardani, 2020:149-150)

G. Teknik Analisis Data

Menurut Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya jenuh. Teknis analisis data yang digunakan penulis adalah teknik analisis data berdasarkan Miles dan Huberman (Sugiyono, 2023:321) yaitu :

1. Pengumpulan Data

Pengumpulan data adalah kegiatan utama pada setiap penelitian. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah kedalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Dalam penelitian Kualitatif pengumpulan data dengan observasi, wawancara secara mendalam dan dokumentasi sehingga data yang diperoleh akan banyak.

2. Reduksi Data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih dan memilah hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan.

3. Penyajian Data

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah menyajikan data. Penyajian data dalam penelitian kualitatif, bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchat dan sejenisnya. Yang sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif. Dengan mendisplaykan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.

4. Penarikan Kesimpulan/Verifikasi

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau

gambaran suatu obyek yang sebelumnya masih remang-remang gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori. Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten pada saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

H. Uji Kredibilitas Data

Data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahan referensi dan member check (Sugiyono, 2023: 365-371).

1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan, wawancara lagi dengan sumber data yang pernah ditemui maupun yang baru. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin akrab (tidak ada jarak lagi), semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi.

2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkesinambungan. Dengan cara tersebut maka kepastian data dari urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Mengapa dengan meningkatkan ketekunan dapat meningkatkan kredibilitas data? Meningkatkan ketekunan itu ibarat kita mengecek soal-soal atau makalah yang telah dikerjakan, ada yang salah atau tidak. Dengan meningkatkan ketekunan itu maka peneliti dapat melakukan pengecekan kembali apakah data itu salah atau tidak.

3. Triangulasi

Triangulasi dalam penguji kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara, dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik pengumpulan data dan waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang

diperoleh melalui beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi atau teknik lain dalam waktu dan situasi yang berbeda.

4. Analisis Kasus Negatif

Melakukan analisis kasus negatif berarti peneliti mencari data yang berbeda atau bahkan bertentangan dengan data yang telah ditemukan. Bila tidak ada lagi data yang berbeda atau bertentangan dengan temuan, berarti data yang ditemukan sudah dapat dipercaya. Tetapi bila peneliti masih mendapatkan data-data yang bertentangan dengan data yang ditemukan, maka peneliti mungkin akan merubah temuannya. Hal ini sangat tergantung seberapa besar kasus negatif yang muncul tersebut.

5. Menggunakan Bahan Referensi

Yang dimaksud dengan bahan referensi di sini adalah adanya pendukung untuk membuktikan data yang telah ditemukan oleh peneliti, sebagai contoh, data hasil wawancara perlu didukung dengan adanya rekaman wawancara. Data tentang interaksi manusia atau gambaran suatu keadaan perlu didukung oleh foto-foto. Alat-alat bantu perekam data dalam penelitian kualitatif, seperti kamera, handycam, alat rekam suara sangat diperlukan untuk mendukung kredibilitas data yang telah ditemukan oleh peneliti.

6. Membercheck

Membercheck adalah proses pengecekan data yang diperoleh peneliti kepada pemberi data. Tujuan membercheck adalah untuk mengetahui seberapa jauh data yang diperoleh sesuai dengan apa yang di berikan oleh pemberi data. Apabila data yang ditemukan disepakati oleh para pemberi data berarti datanya tersebut valid, sehingga makin kredibel/dipercaya, tetapi apabila data yang ditemukan peneliti dengan berbagai penafsirannya tidak disepakati oleh pemberi data, maka peneliti perlu melakukan diskusi dengan pemberi data, dan apabila perbedaannya tajam, maka peneliti harus merubah temuannya, dan harus menyesuaikan dengan apa yang diberikan oleh pemberi data. Pelaksanaan membercheck dapat dilakukan setelah satu periode pengumpulan data selesai, atau setelah mendapat suatu temuan, atau kesimpulan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anonim, Undang-Undang No. 18 Tahun 2008 *Tentang Pengelolaan Sampah*.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2016
Tentang Penyelenggaraan Kebersihan dan Keindahan Lingkungan.
- Anonim, Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 46 Tahun 2011
Tentang Retribusi Pelayanan Persampahan/Kebersihan
- Agustino Leo, Ph. D. 2022. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta
- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Affrian, Reno. 2023. *Model-Model Formulasi, Implementasi, dan Evaluasi Kebijakan*. Yogyakarta: CV Bintang Semesta Media.
- Ariani, Atika. 2023. *Implementasi Peraturan Bupati Balangan Nomor 38 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Kecamatan Halong Kabupaten Balangan (Studi Kasus Desa Suryatama dan Desa Sumber Agung)*: STIA Amuntai
- Dewi, Rahayu Kusuma. 2016. *Studi Analisis Kebijakan*. Bandung: ALFABETA
- Hardani Dkk. 2020. *Metodologi Penelitian Kualitatif & Kuantitatif*). Yogyakarta: CV Pustaka Ilmu
- Jayanti, Mira. 2022. *Implementasi Kebijakan Pengelolaan Sampah di Desa Banjaran Oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten*. Skripsi. FISIP UNPAS: Universitas Pasundan
- Murdiyanto, Eko. 2020. *Penelitian Kualitatif (Teori dan Aplikasi disertai contoh proposal)*. Yogyakarta: UPN Veteran Yogyakarta Press
- Sugiyono. 2023. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung:ALFABETA.

Tim Penyusun. 2022. *Pedoman Penyusunan dan Penulisan Skripsi Program Studi S1 Administrasi Publik*. Amuntai: STIA Amuntai.

Winarno, Budi. 2014. *Kebijakan Publik (Teori, Proses, Dan Studi Kasus)*. Yogyakarta: CAPS (Center of Academic Publishing Service).